

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat (Agustina et al., 2023). *World Population Review* (2023) mempublikasikan data yang menyatakan Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah negara India, China, dan Amerika Serikat. Dalam lima tahun terakhir jumlah populasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada pertengahan 2019 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 266.911,8 ribu jiwa dan terus meningkat hingga menyentuh angka 278.696,2 ribu jiwa pada tahun 2023. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat dari pertumbuhan pasokan bahan pangan. Malthus menjelaskan ketika terjadi peningkatan bahan pangan tanpa terkendali, maka dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk lebih besar dari batas maksimal pasokan bahan pangan (Suharto & Mulawarman, 2022).

Menurut teori penawaran tenaga kerja, perubahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (R. P. Santoso, 2012). Hal ini karena peningkatan jumlah penduduk di Indonesia diikuti dengan meningkatnya ketersediaan jumlah angkatan kerja (Mulyadi, 2017). Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja Indonesia adalah 135.859.695 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai angka 147.707.452 jiwa pada tahun 2023. Indonesia memiliki aset berupa potensi pasar yang cukup besar dalam ketersediaan angkatan kerja, namun kenyataannya jumlah penduduk dan angkatan kerja di Indonesia justru menjadi tantangan dalam pembangunan negara karena dapat mendorong adanya pengangguran (Prawira, 2018).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena dapat menyebabkan penurunan standar kehidupan (Mankiw, 2003). Pengangguran menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak adanya sumber pendapatan yang mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup.

Pengangguran dapat menyebabkan angka kemiskinan meningkat, tingkat pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan secara tidak langsung pengangguran juga mendorong seseorang melakukan kriminalitas. *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* menyatakan Indonesia berada di posisi pertama dari 6 negara lainnya dengan pengangguran tertinggi di ASEAN per Februari 2024. Pada periode 2017-2023 secara nasional TPT tertinggi mencapai angka 7,07% pada tahun 2020 dan 6,49% di tahun 2021.

Indonesia memiliki 75 kota yang inflasinya diukur untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Berdasarkan 75 kota yang mengalami inflasi pada periode 2017-2023, beberapa diantaranya memiliki angka pengangguran lebih besar dari angka nasional. Persentase kota yang memiliki pengangguran lebih besar dari nasional berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 61% dari kota yang inflasi memiliki pengangguran melebihi nasional, kemudian angka ini meningkat hingga mencapai 65% pada tahun 2018 dan berhasil turun hingga 56% pada tahun 2022. Namun angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2023 hingga 57% atau sekitar 43 kota dari 75 kota yang memiliki pengangguran lebih besar dari nasional.

Pengangguran disebabkan oleh kurang sempurnanya informasi pasar tenaga kerja, dan juga karena rendahnya permintaan tenaga kerja pada suatu perekonomian (Mulyadi, 2017). Mankiw (2003) menjelaskan bahwa pengangguran dan inflasi terjadi erat kaitannya dengan kebijakan terhadap permintaan agregat, ketika adanya kebijakan peningkatan permintaan agregat maka pengangguran akan turun dan inflasi akan naik. Sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat akibat turunnya upah ketika meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja (Setiono et al., 2023).

Inflasi merupakan keadaan dimana harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara terus menerus yang kemudian berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Menurut teori ekonomi, inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat pengangguran dan begitupun sebaliknya (Wulandari et al., 2019). Inflasi tidak dapat dihentikan tanpa meningkatkan pengangguran dan pengangguran tidak dapat dikurangi tanpa adanya risiko inflasi yang meningkat (Vangjeli & Agolli,

2017). Indonesia memiliki inflasi yang berfluktuasi setiap tahunnya, dalam periode 2017-2023 inflasi tertinggi mencapai angka 5,51% pada tahun 2022 dan 3,61% pada tahun 2017. Secara keseluruhan pada periode 2017-2023, sebanyak 52 dari total 75 kota inflasi atau sekitar 69% kota memiliki inflasi yang lebih besar dari nasional pada tahun 2022.

Menurut teori kurva Phillips, terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran yang artinya ketika inflasi tinggi cenderung diikuti dengan turunnya pengangguran. Menurut Wulandari dalam penelitiannya bahwa di Indonesia, kondisi yang dijelaskan pada kurva Phillips tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi Indonesia, dimana berdasarkan data ketika terjadi peningkatan inflasi diikuti dengan angka pengangguran yang cenderung turun, namun ada juga beberapa wilayah yang ketika inflasinya turun angka pengangguran juga ikut turun, atau ketika inflasinya naik maka pengangguran juga ikut naik yang dikenal juga dengan istilah stagflasi.

Selain inflasi, penetapan upah minimum juga berkaitan terhadap angka pengangguran. Penetapan upah minimum dilakukan bertujuan untuk melindungi pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya (I. H. Santoso & Kristiyanto, 2021). Kenaikan upah berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan, salah satunya dapat meningkatkan pengangguran karena penetapan upah minimum menyebabkan meningkatnya biaya upah pekerja tidak terampil (Kim & Lim, 2018). Menurut Ramos-Herrera (2023) penetapan batas upah minimum yang mengikat akan cenderung berdampak pada pengurangan lapangan kerja bagi pekerja muda dan pekerja yang kurang memiliki keterampilan sehingga pengangguran meningkat. Disisi lain, tingkat upah minimum yang sesuai dapat mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dan dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Pada sektor ketenagakerjaan, penetapan upah minimum memberikan dampak yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja pada sektor formal dan informal. Peningkatan upah minimum dapat mendorong keputusan perusahaan dalam mengurangi penggunaan tenaga kerja pada sektor formal, akibatnya tenaga kerja akan mencari pekerjaan lain sehingga terjadi peningkatan penggunaan tenaga kerja pada sektor informal (Elfiandri & Bachtiar, 2004). Menurut data yang dipublikasikan BPS, proporsi lapangan kerja Indonesia

didominasi oleh sektor informal. Namun secara keseluruhan proporsi lapangan kerja Indonesia baik di sektor formal atau informal setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Selain itu, tingkat upah akan mempengaruhi daya beli masyarakat, ketika terjadi peningkatan upah maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga harga akan naik atau terjadi inflasi.

Pada periode 2017-2023 perkembangan upah minimum di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 menuju 2021 rata-rata upah minimum setiap provinsi tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data, fenomena hubungan pengangguran, inflasi dan upah ini sesuai dengan teori Keynes dan juga teori klasik. Menurut teori klasik upah berperan penting dalam penetapan harga dan juga dapat mempengaruhi permintaan serta penawaran tenaga kerja. Disisi lain, teori Keynes menjelaskan bahwa kenaikan upah akan menghasilkan permintaan agregat yang lebih tinggi dan lebih banyaknya prospek lapangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran, namun tingginya permintaan agregat akibat naiknya upah akan mendorong terjadinya inflasi suatu wilayah.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi, seperti studi yang dilakukan oleh Santoso dan Kristiyanto pada tahun 2021 yang menemukan bahwa 78% pengangguran di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan melalui inflasi dan upah minimum. Kenaikan inflasi menyebabkan peningkatan pengangguran sedangkan kenaikan upah minimum mampu menyebabkan turunnya angka pengangguran. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar pada tahun 2020 yang menemukan bahwa ketika terjadi kenaikan upah maka akan diikuti dengan peningkatan pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan kenaikan inflasi menyebabkan turunnya pengangguran di Nigeria. Montenegro dan Pages pada penelitian Biçerli & Kocaman (2019) menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum berdampak terhadap pengurangan lapangan pekerjaan bagi kaum muda dan pekerja yang tidak terampil. Namun menurut penelitian Tomasz Grodzicki dan Mateusz Jankiewicz inflasi atau tidak ada

perubahan yang signifikan terhadap lapangan kerja akibat peningkatan upah minimum di Swedia.

Besarnya persentase kota-kota yang diukur inflasinya di Indonesia yang memiliki pengangguran dan inflasi yang lebih besar dari angka nasional pada kondisi upah minimum di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun menarik perhatian penulis untuk mengkaji hubungan antara inflasi, upah minimum, dan pengangguran. Hal ini didukung dengan ditemukannya hasil dan arah penelitian yang berbeda dari beberapa studi serupa, Maka dari itu, penelitian ini difokuskan hanya melihat bagaimana hubungan antara upah minimum, pengangguran terbuka dan inflasi di Indonesia pada tahun 2017-2023.

### 2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana panel VECM memodelkan upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi di indonesia
2. Bagaimana efek *shock* pada variabel upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi melalui analisis *Impulse Response Function* (IRF)
3. Bagaimana kontribusi variabel upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi melalui analisis *Variance Decomposition* (VD)

### 3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model panel VECM upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui efek *shock* upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi di Indonesia melalui analisis *Impulse Response Function* (IRF)
3. Untuk mengetahui kontribusi setiap variabel melalui analisis *Variance Decomposition* (VD)